

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Pertama, sejak masa kepemimpinan Mustafa Kemal Pasya, mimpi Turki adalah menjadi bagian dari Eropa, dari Barat. Turki merupakan negara sekuler agamis dimana masyarakatnya lebih cenderung menggunakan budaya dan sistem sosial Barat sebagai acuan dalam kehidupan sehari-hari. Keinginan untuk menjadi negara sekuler, demokratis, industri dan bervisi nasional dengan kekuatan militer yang juga setara Barat ibaratnya telah mendarah daging. Untuk itu Turki berupaya keras melakukan deislamisasi dan membangun pendidikan yang bersifat Barat. Bahasa Turki tidak ditulis dalam huruf Arab, Turki mengadopsi huruf Latin dan terus mendorong kepalanya ke pangkuan Barat. Usaha Turki menjadi Barat lain adalah permohonannya menjadi anggota MME dan Uni Eropa pada tahun 1987. Bahkan Turki juga telah menerapkan standart keanggotaan Uni Eropa yaitu menegakkan demokrasi, menjunjung kebebasan, serta menghormati hukum dan hak asasi manusia. Turki mengajukan permohonan secara resmi untuk masuk anggota Uni Eropa pada tahun 1999. Proses penerimaan Turki dalam Uni Eropa harus melalui jalan panjang karena kondisi Turki yang dinilai belum memenuhi syarat untuk masuk dalam keanggotaan Uni Eropa. Peluang Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa menghadapi banyak kendala. Masalah yang utama adalah menyangkut perbedaan budaya Turki dan Eropa. Turki merupakan negara yang berpenduduk mayoritas muslim sedangkan Uni Eropa merupakan organisasi

yang berkeanggotaan negara-negara non muslim. Selain itu, tantangan utama yang dihadapi Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa adalah terkait dengan masalah HAM dan kinerja pemerintah Turki terhadap kelompok minoritas di negara itu. Bagi Turki sendiri khususnya kelompok nasionalis ekstrim, mengambil kebijakan untuk memberi konsesi besar terhadap kelompok minoritas negara itu merupakan keputusan yang sangat sulit.

Kedua, masalah mengenai dukungan Turki terhadap upaya penyatuan Siprus ini menarik bagi penulis untuk mengetahui lebih dalam tujuan utama yang ingin dicapai Turki pada proses reunifikasi tersebut mengingat selama kurang lebih 30 tahun Turki begitu gigih mempertahankan kekuasaannya di pulau Siprus bagian utara. Hal tersebut mendorong penulis untuk menulis skripsi dengan judul: **POLITIK LUAR NEGERI TURKI TERHADAP SIPRUS (Studi Kasus : Dukungan Turki atas Penyatuan Siprus Turki dan siprus Yunani).**

B. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi mengenai “Politik Luar Negeri Turki terhadap Siprus (Studi Kasus : Dukungan Turki Atas Penyatuan Siprus Turki Dan Siprus Yunani)” ini, dilakukan penulis dengan tujuan :

1. Memperluas dan memperdalam pengetahuan penulis tentang penyelesaian konflik Siprus-Turki yang telah berlangsung lama.
2. Dapat menjelaskan kenapa Turki cenderung mendukung upaya penyatuan Siprus Turki dan Siprus Yunani.

3. Untuk menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama mengikuti kuliah.
4. Untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik spesialisasi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Turki merupakan negara dua benua. Sekitar 95 persen dari wilayah seluas 780.580 km² ini berada di Asia, selebihnya masuk ke kawasan Eropa. Ada yang menduga bangsa Hittiti yang menjadi penduduk pertama di kawasan ini, berasal dari Eropa.¹ Dugaan yang lebih populer memperkirakan orang Hittiti berasal dari Asia Tengah.² Namun demikian, dalam banyak hal Turki lebih berkiblat ke Barat dibandingkan mengadaptasi sosio-politik dan kebudayaan Timur dari Asia. Turki adalah negara muslim yang mengedepankan pembangunan kerjasama dengan negara Eropa.

Memasuki tahun pertama Masehi, wilayah Turki yang saat itu bernama Kerajaan Bizantium dikuasai Romawi selama empat abad. Kekuasaan Romawi dijatuhkan kaum Barbar. Pada masa inilah ibukota kerajaan dipindahkan dari Roma ke Konstantinopel (sekarang Istanbul). Pada abad ke-12 Bizantium jatuh ke dalam kekuasaan Kerajaan Ottoman yang dipimpin Raja Osman I. Pada periode ini Turki berada dalam masa keemasan Turki Ottoman.

¹Fahmi Amhar, "Warisan Keagungan Khilafah Utsmaniyah Di Istanbul", dalam <http://www.al-shia.com/html/id/service/Info-Negara-Muslim/Turki.htm>, diakses 10 Oktober 2005

²Ibid

Pada masa inilah pemerintahan Turki Ottoman memperoleh pengaruh Islam yang kuat. Bahkan sepeninggal Khulafaur Rasyiddin, Turki menjadi Khilafah Islamiyah di bawah dinasti Utsmaniyah. Wilayahnya meliputi jazirah Arab, Balkan, Hongaria hingga kawasan Afrika Utara. Namun kekhalifahan itu hancur akibat perebutan kekuasaan di dalam yang melibatkan intervensi sejumlah negara asing.

Bermula dari perlawanan terhadap campur tangan asing yang dipimpin Musthofa Kemal, aksi perjuangan berubah menjadi penentangan terhadap kekuasaan Khalifah. Moment kehancuran Khilafah Islamiyah sendiri terjadi saat rakyat Turki melalui wakil-wakilnya mengeluarkan Piagam Nasional (Al Mitsaq Al Wathoni). Sejak itu, Turki menjadi sebuah negara tersendiri, terpisah dari wilayah-wilayah yang dulu merupakan kesatuan Khilafah Islamiyah.³ Khalifah Abdul Majid yang terakhir berkuasa, terusir ke luar Turki.

Pada 1923, disepakatilah berdirinya negara Turki dengan batas-batas wilayah seperti saat ini. Laut Hitam di utara; Irak, Suriah dan Laut Tengah di selatan; Laut Aegea di barat dan Iran serta Rusia di timur. Negara republik dengan ibukota Ankara itu, pertama kali dipimpin oleh Musthofa Kemal. Ia melakukan modernisasi besar-besaran dengan berkiblat ke Barat. Ia mengganti penggunaan huruf Arab dengan Latin, poligami dilarang dan wanita diberi kebebasan yang sama dengan pria. Angka melek huruf, mencapai 90 persen dari 64 juta penduduk Turki saat ini. Kemal pun beroleh gelar Bapak Bangsa Turki (Attaturk) sehingga dikenal sebagai Kemal Attaturk.

³ Ibid

Sejak diproklamasikannya Republik Turki modern pada tahun 1923, Turki selalu menempatkan kepentingannya yang besar dengan melakukan hubungan luar negeri yang condong ke Eropa (Barat). Hal tersebut ditempuh dengan jalan antara lain bergabung sebagai anggota di dalam organisasi NATO serta permohonannya menjadi anggota MEE dan Uni Eropa pada tahun 1987. Tidak seperti menjadi anggota NATO berlangsung mudah yang didukung oleh kondisi Perang Dingin, keinginan untuk bergabung dengan Uni Eropa selalu menghadapi kendala oleh isu hak asasi dan instabilitas ekonomi. Krisis ekonomi, pelanggaran hak asasi, dan proses demokrasi yang tersendat dianggap kendala bagi Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa. Untuk itu, dalam kaitannya dengan upaya untuk integrasi dalam Uni Eropa Turki menyesuaikan diri dengan standar demokrasi ala Eropa, yaitu menjunjung kebebasan, serta menghormati hukum dan hak asasi manusia salah satunya dengan cara menghapuskan hukuman mati. Kendala itu bertambah ketika Uni Eropa menetapkan pengakuan atas kemerdekaan Siprus sebagai syarat perundingan akhir bagi keanggotaan Turki.⁴

Permasalahan di pulau Siprus bermula pada tahun 1964 dimana pada waktu itu Presiden Uskup Agung Makarios dari Siprus dan pemerintahannya bertekad untuk mengubah konstitusi negara itu dengan membatasi otonomi minoritas warga turki. Warga Turki ditekan dan sejumlah desa warga Turki diserbu. Pemerintahan Inonu menjawab dengan mengerahkan angkatan udara yang mengitari Siprus dan mengancam akan melancarkan invasi kalau Makarios tidak menghentikan tindakannya. Saat itu diragukan apakah angkatan udara Turki

⁴ Kendala Turki Menjadi Anggota Uni Eropa, dalam <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0412/18/opini/1445789>, diakses 10 Oktober 1005

memiliki kemampuan teknis untuk melakukan pendaratan seperti itu, namun rencana invasi itu dicegah oleh reaksi Amerika dalam bentuk sepucuk surat dari Presiden Johnson kepada perdana Menteri Inonu. Di dalam surat tersebut Johnson memperingatkan bahwa invasi Turki akan menyebabkan ikut campurnya Uni Soviet ke dalam konflik itu dan negara-negara NATO tidak akan secara otomatis memihak Turki seandainya hal itu terjadi. Johnson juga menyatakan bahwa dia tidak akan mengizinkan penggunaan peralatan perang yang disumbangkan oleh USA dalam invasi apapun.

Krisis itu merebak lagi tahun 1967 ketika junta militer yang ditempatkan di Athena mendorong kaum nasionalis Yunani di Siprus untuk mengobarkan agitasi untuk enosis, penyatuan pulau itu dengan daratan Yunani.⁵ Turki mendesak Yunani, selama beberapa hari di bulan November perang tampaknya telah diambang pintu, namun junta militer itu mau mundur dan krisis pun bisa diatasi lagi. Tetapi ketika junta Yunani diujung kehancuran tahun 1974, ia merencanakan kudeta menentang Makarios di Siprus yang dilakukan oleh pengawal nasional siprus, yang ingin memproklamkan enosis. Pemerintahan Ecevit di Ankara menuntut adanya intervensi negara-negara yang menjamin kemerdekaan dan orde konstitusional Siprus Ditahun 1960 (Turki, Inggris, dan Yunani). Ecevit bertekad untuk menunjukkan bahwa Turki dapat bertindak mandiri, dan ketika kedua negara lainnya menolak untuk bertindak, ia kemudian memerintahkan intervensi militer oleh angkatan bersenjata Turki. Pasukan Turkin mendarat di Siprus Utara tanggal 20 Juli 1974 dan mendirikan pangkalan sekitar Kyrenia (Girne). Dua hari

⁵ Erik J. Zürcher, *Sejarah Modern Turki*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2003, hal. 367

berikutnya gencatan senjata disepakati, namun ketika kekerasan komunal di Siprus berlanjut, pasukan-pasukan itu memulai lagi serangan kedua pada tanggal 14 Agustus, dimana sekitar 40 persen pulau Siprus berada di bawah pengawasan Turki.

Setelah tindakan-tindakan ini (yang dalam propaganda pemerintah Turki disebut *baris harekati* atau 'operasi perdamaian') pulau itu betul-betul berdiri sendiri.⁶ Warga Yunani di utara dan warga Turki di selatan melarikan diri atau dipaksa mengungsi dan dimukimkan kembali di sektor lain. Sekitar 170.000 warga Siprus Yunani terpaksa melarikan diri ke Selatan. Kurang lebih 45.000 pengungsi Siprus Turki bermigrasi ke utara, yang kemudian disusul oleh 114.000 warga Turki pendatang dari daerah Anatolia di Turki daratan. Sejak saat itu Siprus terpecah dua menjadi Siprus Turki dan Siprus Yunani.

Tahun 1983 Republik Turki Siprus Utara (TRNC) berdiri pada masa kekuasaan Rauf Denktash, yang kemudian menjadi pemimpin masyarakat Siprus Turki. TRNC hanya diakui oleh Turki sedangkan Republik Siprus Selatan, yaitu Siprus Yunani, secara internasional diakui sebagai pemerintah Siprus yang sah. Karena terisolasi secara diplomatik, perekonomian Siprus Utara sangat menderita, menyebabkan hijrahnya 54.000 warga Siprus Turki.

Turki sejak kepemimpinan Kemal Ataturk memilih sekularisme. Agama adalah masalah yang tak boleh terlihat di ruang publik. Maka yang ditempuh pemerintah adalah menghapus pendidikan berbasis agama (madrasah), melarang pemakaian jilbab atau turban dan jubah bagi pria di tempat umum dan bahkan

⁶ Ibid

kumandang azan. Meski masjid besar bertebaran di seantero Turki namun suara azan tidak pernah terdengar. Masjid-masjid yang indah itu kemudian menjadi saksi bisu dari upaya pemerintah meng-Eropa-kan Turki. Berbagai upaya ditempuh Attaturk untuk dapat menjadi bagian dari bangsa Eropa.

Keinginan Turki untuk berintegrasi dengan Uni Eropa sempat mengalami surut ketika Erbakan menjabat sebagai Perdana Menteri. Di bawah kepemimpinannya, Erbakan menyerukan pembatasan hubungan dengan Eropa dan Amerika Serikat. Sikap konfrontatif Erbakan dengan tidak mau berhubungan terlalu dekat dengan Barat membuat posisi Turki terjepit dalam upayanya menjadi anggota Uni Eropa. Dalam masalah Siprus, Erbakan melihat bahwa masalah yang terjadi di Siprus harus dilihat secara hati-hati mengingat hal tersebut menyangkut keberadaan etnis Turki didalamnya. Erbakan berkeyakinan bahwa Turki harus terus melindungi keberadaan etnis Turki yang berada di Siprus.

Praktis Erbakan mendapat dukungan dari kalangan militer dan sekuler hanya terkait isu Siprus dimana Erbakan lebih meyakini keberadaan Turki sebagai pelindung kelompok minoritas dalam hal ini etnis Turki. Sebaliknya kebijakan Erbakan banyak dianggap kontraproduktif baik dengan ideologi sekuler pada khususnya dan kepentingan integrasi Turki dalam Uni Eropa pada umumnya. Dampaknya, Erbakan harus rela meletakkan jabatannya sebelum masa jabatannya usai.

Mesut Yilmaz kemudian naik menjadi Perdana Menteri pada tanggal 30 Juni 1997 setelah kejatuhan Erbakan. Yilmaz memulai kembali dialog dengan Uni Eropa untuk membicarakan keanggotaan Turki yang tertunda ketika pemerintahan

Erbakan. Yilmaz menegaskan pada kelompok militer dan sekuler , dan Bara, bahwa ia akan mengakhiri politik Islam dalam politik Turki. Khusus mengenai masalah Siprus, kebijakan Yilmaz sepaham dengan Erbakan, Yilmaz melihat arti penting Siprus bagi Turki tidak hanya sebagai negara yang patut dilindungi, tetapi lebih pada pandangan geopolitik dan geoekonomi.

Setelah Yilmaz mengakhiri masa kekuasaannya, kepemimpinan Turki beralih pada Bülent Ecevit pada tanggal 11 Januari 1999. Sama halnya dengan Yilmaz, Ecevit memandang arti penting bergabungnya Turki dalam Uni Eropa. Bahkan di era ini. Turki mulai sedikit melunak mengenai masalah Siprus. Ecevit membuka kembali pembicaraan mengenai perdamaian Siprus yang disponsori PBB. Ecevit menyetujui perdamaian Siprus dengan catatan bahwa akan ada power sharing antara etnis Yunani dan etnis Turki di Siprus. Jika hal tersebut tidak terjadi maka Turki akan tetap mempertahankan pasukannya di Siprus.

Perubahan besar kebijakan Turki terhadap Siprus terjadi ketika Erdogan tampil sebagai Perdana Menteri. Erdogan menegaskan keseriusannya untuk mendapatkan keanggotaan Uni Eropa bagi Turki. Diantara syaratnya adalah mengenai isu Siprus. Turki mulai membuka jalan bagi perundingan atas penyelesaian konflik Siprus, embargo terhadap Siprus Yunani mulai dihentikan dengan jalan membuka perbatasan kedua wilayah. Kemudian Turki juga mendukung upaya referendum dengan mayoritas memberikan suara “Ya” atas proses penyatuan Siprus. Hal tersebut dilakukan Turki demi perbaikan negaranya baik dalam bidang politik maupun ekonomi.

Pada tingkat domestik Turki saat ini menunjukkan dirinya sebagai negara yang sangat bergejolak dan dengan demikian lemah. Struktur partai telah menjadi sangat terpecah di dalam lima tahun terakhir. Saat ini Turki masih merasakan dampak krisis finansial tahun 2000-2001, yang digambarkan sebagai kondisi paling buruk sejak tahun 1945. Turki memiliki sektor swasta yang kuat dan tumbuh cepat, namun negara masih memainkan peranan utama dalam industri dasar, perbankan, transportasi dan komunikasi. Pada tahun-tahun terakhir, situasi perekonomian telah ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak menentu dan ketidakseimbangan yang serius.

Point lemah dari perekonomian Turki adalah bahwa sektor pertanian yang masih besar dan tidak efektif, sektor keuangan yang sangat lemah, stabilitas moneter yang kronis, produktivitas rendah dalam pertanian dan proporsi usaha kecil yang sangat tinggi menambah kesulitan situasi ini. Inflasi tinggi sejak bertahun-tahun (antara 60 dan lebih dari 100% pertahun). Manajemen pajak sangat tidak efisien, yang menyebabkan negara kadang-kadang kehilangan pendapatan yang tinggi. Investasi asing langsung tidak cukup selama bertahun-tahun karena ketidakstabilan politik. Sistem jaminan sosial sangat tidak efisien, yang menyebabkan masalah anggaran tambahan setiap tahun.

Keinginan Turki menjadi anggota tetap Uni Eropa adalah kepentingan yang mendesak dan harus segera direalisasikan. Pertumbuhan ekonomi Eropa yang pesat ditunjang oleh industrialisasi yang terus berkembang menjadikan daya tarik bagi Turki untuk bergabung ke dalam Uni Eropa. Bergabungnya Turki ke dalam Uni Eropa lebih menjanjikan baik secara ekonomi maupun politik dari pada harus

bergabung atau bersubordinasi dengan negara-negara tetangganya di Timur Tengah. Dengan bergabungnya Turki dengan Uni Eropa maka secara ekonomi Turki akan diberikan hak yang sama dengan negara anggota Uni Eropa lainnya mengenai kebebasan lalulintas barang dan jasa tanpa terkena bea atau lebih sering dikenal dengan *sistem free trade area*. Sedangkan secara politik keuntungan Turki menjadi anggota Uni Eropa akan mengangkat citra Turki dalam percaturan politik dunia.

Upaya integrasi Turki ke dalam Uni Eropa ternyata membawa efek domino bagi kebijakan politik Turki terhadap Siprus. Meski Uni Eropa tidak mensyaratkan secara mutlak penyelesaian Siprus sebagai syarat bagi Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa namun keterlibatan Turki dalam penyelesaian Siprus akan menjadi nilai positif bagi upaya Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa. Masalah Siprus menjadi sumber ketegangan antara Turki dan Uni Eropa karena Uni Eropa terus mempermasalahkan perlindungan HAM di kawasan Siprus Utara. Uni Eropa bahkan menekan Turki agar mengakui kemerdekaan wilayah itu.

Pada awal Februari 2004 dimulai upaya baru untuk menyelesaikan konflik Siprus tersebut. Perserikatan Bangsa-bangsa telah mengajukan rencana bagi perdamaian dan penyatuan kembali pulau itu. Upaya tersebut dimulai dengan diadakannya pertemuan antara para pemimpin kelompok etnis Yunani dan Turki di Siprus yakni Tassos Papadopoulos dan Rauf Denktash dengan dipelopori oleh Sekjen PBB Kofi Annan. Pokok pembahasan adalah rencana Kofi Annan bagi penyatuan kembali pulau di laut Tengah yang sejak 30 tahun terbagi menjelang masuknya Siprus sebagai anggota Uni Eropa bulan Mei 2004. Dalam hal ini Turki

bersedia mengakui Siprus apabila kedua bagian pulau yang terbelah yakni Turki dan Yunani disatukan kembali dan menolak mengakui Siprus bagian Yunani sebagai negara merdeka. Permasalahan ini mendorong pemimpin kelompok etnis Turki di Siprus, Rauf Denktasch, untuk mengoreksi politik blokadanya yang diterapkannya sejak puluhan tahun. Di bulan April 2003, setelah puluhan tahun, Denktasch membuka pagar pemisah di Siprus. Warga dengan bebas dapat saling berkunjung, meski pun hanya kunjungan harian. Ribuan warga yang melintasi perbatasan menunjukkan bahwa warga Turki dan Yunani tampaknya dapat hidup bersama, tanpa saling menyerang.

Namun dilain pihak Siprus yang menjadi wilayah Yunani cenderung menolak rencana unifikasi yang dibidani PBB tersebut. Pihak Siprus Yunani tidak mau berbagi pemerintahan dengan Turki. Penyatuan kembali Siprus akan membantu Turki dalam mempertahankan wilayahnya dan menyelesaikan masalah imigran yang tidak memiliki tempat tinggal.

Hal-hal tersebut membuktikan bahwa Turki berusaha memberikan dukungan bagi proses penyatuan Siprus. Banyaknya upaya yang dilakukan oleh pemerintah Turki serta pemimpin kelompok sparatis menunjukkan Turki berusaha membuka jalan untuk melancarkan proses perundingan tersebut dan mengakhiri konflik Siprus.

D. Pokok Pemasalahan

Dengan melihat latar belakang seperti diatas dapat dirumuskan pokok masalah yang akan diteliti adalah: Mengapa Turki cenderung mendukung upaya penyatuan Siprus Turki dan Siprus Yunani ?

E. Kerangka Teoritik

Teori adalah bentuk penyelesaian paling umum yang memberitahu kita mengapa sesuatu terjadi. Teori menggambarkan serangkaian konsep menjadi satu penjelasan yang menunjukkan bagaimana konsep-konsep itu berhubungan untuk memahami fenomena hubungan internasional maka perlu penyederhanaan dengan menggunakan kerangka konsep-konsep sebagai suatu yang tidak dapat dielakkan⁷. Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan teori yang berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan luar negeri untuk mencoba menghubungkan pokok permasalahan yang merupakan jawaban sementara.

Jika kita mengamati lebih jauh dan menghubungkan sikap Turki yang akhirnya mendukung proses perdamaian dan unifikasi Siprus, maka tampak banyak faktor yang mendukung dan melatarbelakanginya. Untuk menjelaskan fenomena yang terjadi pada kasus Turki-Siprus, penulis menggunakan Teori Pembuatan Keputusan Luar Negeri dikaitkan dengan Model Aktor rasional sebagai kerangka berpikir, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang terjadi. Teori pembuatan keputusan telah berkembang luas dan banyak digunakan oleh para ilmuwan Hubungan Internasional. Sebagai suatu konsep atau model, *Decision Making Theory* telah banyak membantu menjelaskan fenomena dan menambah pengertian tentang bagaimana fenomena tersebut. Namun pengertian teori, yang berarti membantu menjelaskan apa yang akan terjadi, perannya masih terbatas. *Decision Making* adalah "simply the act of

⁷ Mohtar Mas'ood, Ilmu Hubungan Internasional : *Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES, 1990, hal. 162 - 16

choosing among available alternative about which uncertainty exist”(sekedar tindakan memilih alternatif yang terjadi yang disitu tidak terdapat kepastian).Karena wilayah politik luar negeri biasanya kurang dikenal, jarang terdapat alternatif yang sudah pasti, alternatif-alternatif tersebut sering terpaksa dirumuskan dengan meraba-raba dalam sebuah konteks dari situasi keseluruhan dimana akan muncul perselisihan terhadap perhitungan situasi man yang paling valid, pilihan-pilihan apa yang ada, kosekuensi yang mungkin muncul, dari berbagai pilihan dan nilai-nilai yang harus digunakan sebagai kriteria untuk membuat rangking pilihan dari yang paling dikehendaki sampai yang paling dihindari, terdapat kotroversi terhadap hakekat proses pembuatan keputusan dan terhadap paradigma yang sesuai studi ini.

Esensi setiap pembuatan keputusan dengan demikian adalah memilih diantara berbagai kemungkinan alternatif yang ada untuk kesinambungan kehidupan suatu bangsa. Dengan memperhatikan berbagai situasi yang ada di sekelilingnya, para pembuat keputusan berusaha untuk mendefinisikan situasi atau permasalahan yang mereka hadapi dilingkungannya.

Batasan politik luar negeri menurut Jack C. Plano dan Roy Olton adalah “Politik Luar Negeri merupakan strategi/rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain/unit politik internasional lainnya dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasionalnya yang spesifik, dituangkan dalam terminologi kepentingan nasionalnya.” Dari definisi tersebut terlihat bahwa politik luar negeri merupakan langkah nyata guna mencapai, mempertahankan, dan melindungi kepentingan negara tersebut.

William D. Coplin menjelaskan bahwa pengambilan keputusan dalam menentukan politik luar negeri dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu (a) kondisi ekonomi dan militer, (b) politik dalam negeri, dan (c) konteks internasional⁸.

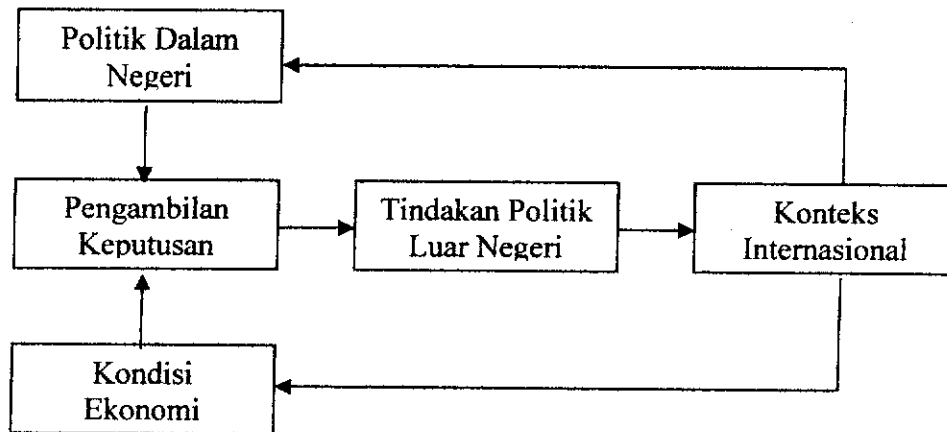
Faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kondisi ekonomi dan militer, yaitu situasi ekonomi dan militer di negara tersebut, termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan keamanan.
- Kondisi politik dalam negeri yang meliputi keadaan atau situasi di dalam negara yang akan membuat keputusan, yaitu situasi politik di dalam negara itu yang berkaitan dengan keputusan tersebut, termasuk didalamnya faktor budaya yang mendasari tingkah laku manusia.
- Konteks internasional adalah suatu produk tindakan politik luar negeri seluruh negara pada masa lampau, masa sekarang dan masa yang akan datang, yang mungkin diantisipasi. Dengan kata lain, menyangkut situasi di negara yang sedang menjadi tujuan politik luar negeri serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

Interaksi faktor-faktor itulah yang menghasilkan tindakan politik luar negeri, seperti digambarkan dalam skema sebagai berikut:

⁸ William D. Coplin, Pengantar Politik Internasional: *Suatu Telaah Teoritis*, Sinar Baru, Bandung, 1992, hal. 30

Skema 1
Pengambilan Kebijakan Politik Luar Negeri
William D. Coplin



(Sumber : William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*, Sinar Baru, Bandung , 1992, hal. 30)]

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut bisa dijelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi keinginan Turki untuk mendukung upaya penyatuan kembali Siprus :

1. Kondisi ekonomi dan militer

Semenjak peninggalan kerajaan Ottoman Turki mengalami krisis ekonomi dan mempunyai utang luar negeri yang belum terselesaikan. Keadaan negara yang semakin memburuk dari tahun ke tahun menimbulkan keinginan yang mendalam bagi Turki pada masa pemerintahan Kemal Attaturk untuk dapat masuk menjadi bagian dari Eropa guna mencapai tujuan perbaikan. Berbagai upaya dilakukan salah satunya dengan jalan membaratkan perekonomian Turki.

Tahun 1983 Republik Turki Siprus Utara (TRNC) berdiri pada masa kekuasaan Rauf Denktash, yang menjadi pemimpin masyarakat Siprus Turki dalam beberapa periode pemerintahan. Mulanya, TRNC hanya diakui oleh Turki. Republik Siprus Selatan secara internasional diakui sebagai pemerintah Siprus yang sah. Namun karena terisolasi secara diplomatik, perekonomian Siprus Utara sangat menderita, menyebabkan hijrahnya 54.000 warga Siprus Turki. Minoritas Siprus Turki tidak mampu secara ekonomi. Penyatuan kembali Siprus menjadikan Siprus Turki akan diakui secara sah sehingga dapat membawa dampak positif bagi pengembangan ekonomi Siprus Turki, diantaranya adalah terbukanya peluang investasi asing di Siprus Turki serta diperolehnya kesempatan menerima bantuan dari luar untuk pembangunan dalam negerinya. Selain itu upaya penyatuan Siprus tersebut juga memberi peluang pada penduduk Siprus Turki untuk memperoleh tempat tinggal.

Selain perbaikan ekonomi, peran aktif militer Turki di Siprus Utara terus menjadi sorotan utama dunia internasional terutama PBB dan Uni Eropa. Keberadaan pasukan Turki di Siprus Utara bisa menghambat proses unifikasi dalam perdamaian di Siprus. Meski bagi rakyat Siprus Turki tentara Turki adalah pelindung dari ancaman serangan etnis Yunani, namun hal tersebut pada sisi lain justru mengancam upaya keanggotaan Turki dalam Uni Eropa.

2. Politik Domestik

Siprus Turki dan Siprus Yunani pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama yaitu karakteristik bangsa Eropa. Kedudukan Siprus Turki ini tidak diakui secara internasional dan dilain pihak Siprus Yunani diakui pemerintahannya

secara sah oleh internasional sehingga kemudian dapat diterima menjadi anggota Uni Eropa pada perluasan keanggotaan Uni Eropa tahun 2004. Hal tersebut semakin mendorong Turki untuk dapat masuk menjadi bagian Eropa yang telah menjadi tujuan kebijakan politik luar negerinya sejak zaman pemerintahan Kemal Attaturk. Berbagai upaya ditempuh Turki diantaranya dengan jalan membaratkan perekonomiannya struktur politik dan sosialnya pada abad 19. Selain itu Turki juga melakukan sekularisasi terhadap negaranya, demokrasi ditegakkan dengan diterapkannya hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Kemenangan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) pada pemilihan umum Turki tahun 2002 berhasil membawa Tayyip Erdogan menduduki kursi Perdana Menteri, meskipun pada awalnya dijabat oleh Abdullah Gul karena citra Erdogan yang cacat hukum.⁹ Erdogan diangkat sebagai Perdana Menteri turki pada 14 Maret 2003. salah satu pernyataan pertama Erdogan dalam menanggapi kemenangan partainya adalah AKP menekankan prioritas utamanya pada upaya peningkatan keanggotaan dalam Uni Eropa.

Dalam rangka kembali mempopulerkan nama Turki di fora internasional pasca krisis politik tahun 2002, krisis yang ditandai dengan pengunduran diri massal para pejabat teras Turki , serta upaya pengintensipan hubungan Turki dengan Uni Eropa. Turki dibawah kepemimpinan Erdogan melakukan berbagai reformasi dalam negerinya, antara lain penegakan hukum, penghapusan hukuman mati, penghormatan terhadap HAM, serta mendukung upaya unifikasi Siprus.

Dengan pendekatan memberikan pelayanan kepada rakyat, pemerintahan

⁹ Erdogan pernah ditahan selama 3 bulan karena melanggar artikel 312 Turkish Penal Code serta dilarang berpolitik selama 3 tahun.

Erdogan kemudian mendapatkan simpati dan dukungan rakyat Turki. Oposisi paling keras selama ini yang dihadapi oleh partai berhaluan Islam seperti AKP, yaitu militer, tidak melakukan aksi apapun atas kebijakan pemerintahan Erdogan karena adanya dukungan dari Uni Eropa.

3. Kontek Internasional

Konteks internasional disini mengacu pada sistem dunia atau sistem global yang berkembang saat ini. Artinya hubungan yang menunjuk pada hubungan saling ketergantungan antara unsur-unsur dalam komponen yang satu dengan unsur-unsur komponen yang lain. Perubahan pada satu komponen akan mempengaruhi komponen yang lainnya. Karenanya kondisi internasional sering dianggap penyebab terpenting terjadinya perilaku negara bangsa dalam hubungan internasional.

Berakhirnya perang dingin membawa perubahan pula dalam konteks internasional, dimana Uni Soviet yang merupakan salah satu kekuatan besar yang menguasai hegemoni dunia telah berakhir sehingga hal ini berpengaruh terhadap kekuasaan Amerika yang semakin tak terkendali. Seiring dengan berjalannya perubahan tersebut, di benua Eropa terbentuk organisasi Uni Eropa sebagai organisasi besar yang hanya beranggotakan negara-negara Eropa yang bertujuan menciptakan perekonomian yang kuat dan stabil bagi masyarakat Eropa khususnya dan turut menstabilkan perekonomian internasional pada umumnya. Kedudukan Uni Eropa yang merupakan suatu kelompok baru yang mempunyai pengaruh besar dalam dunia politik internasional mendorong Turki untuk bergabung dalam organisasi tersebut. Salah satu hambatan keanggotaan Turki

dalam Uni Eropa adalah masalah Siprus. Mulai 1 Mei 2004, Siprus telah menjadi anggota Uni Eropa. Namun Turki masih menempatkan sekitar 40.000 tentara di Siprus Utara. Masalah Siprus yang belum selesai mengakibatkan hanya Siprus bagian Yunani yang diterima menjadi anggota Uni Eropa. Sebagai negara yang secara geografis berdekatan dengan Siprus, invasi Turki pada tahun 1974 mendapat kecaman dari dunia internasional. Turki sebagai satu-satunya negara yang mengakui kedaulatan Republik Turki Siprus Utara (TRNC), dianggap menghambat unifikasi dan perdamaian di Siprus. Turki mendapat tekanan internasional untuk segera menciptakan perdamaian di Siprus dan mendorong pemimpin TRNC untuk kembali ke meja perundingan demi terciptanya negara Siprus yang terdiri dua etnis yang selama ini bersitegang. Apabila Turki mendukung upaya penyatuan Siprus, maka boikot internasional terhadap Siprus Turki akan berkurang secara bertahap. Serta diterimanya Turki dalam organisasi Uni Eropa akan membawa negara tersebut keluar dari krisis ekonomi dan politik.

Konsep yang selanjutnya adalah model aktor rasional. Menurut Graham T. Allison, politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, terutama suatu pemerintahan yang monolit, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan.

Kemenangan Tayyip Erdogan sebagai perdana menteri Turki pada pemilu November 2002 membuat jalan menuju reunifikasi Siprus semakin terbuka lebar. pada awalnya pemerinthan baru pimpinan PM Tayyip Erdogan berkali-kali menolak mengakui Siprus Yunani sebagai negara merdeka yang diakui secara sah oleh internasional dan menggagalkan proses perundingan penyatuan Siprus.

Karena sikap keras pemerintah Erdogan tersebut, maka pada 1 Mei 2004 hanya Siprus termasuk Siprus Yunani yang berhak menjadi anggota penuh Uni Eropa. Sedangkan keanggotaan Turki dalam Uni Eropa masih dalam proses panjang yang setidaknya sampai Turki mau mengakui kemerdekaan Siprus dan menerima perundingan bagi penyatuan Siprus.

Pengakuan Turki atas kemerdekaan Siprus merupakan salah satu syarat untuk menjadi anggota Uni Eropa. Adanya tuntutan Uni Eropa tersebut membuat Perdana Menteri Tayip Erdogan melakukan koreksi terhadap kebijakan politik luar negerinya terhadap Siprus.

Setelah kemenangannya pada pemilu 2002, Erdogan menjadi penguasa di Turki dan salah satu agenda utama pemerintahannya adalah berintegrasi dengan Uni Eropa. Pemerintah PM Erdogan untuk pertama kalinya menyadari pembagian pulau Siprus sebagai masalah bagi Eropa dan juga bagi Turki. Untuk itu Turki mengupayakan penyelesaian yang adil dan permanen. Pada awalnya Erdogan bersedia membuat kesepakatan dengan Uni Eropa untuk menandatangani protokol yang memperluas penyatuan kepebeaannya dengan Uni Eropa meliputi 10 anggota baru termasuk Siprus. Perluasan protokol itu adalah syarat utama sebelum Turki memulai pembicaraannya untuk masuk Uni Eropa pada Oktober 2005. Namun, bagi Turki penandatanganan protokol bukan berarti pengakuan politik bagi pemerintahan Siprus Yunani.

Langkah lain yang diambil Erdogan untuk mengatasi sengketa Siprus adalah mengungkapkan kritiknya terhadap pemimpin Siprus pro Turki, Rauf Denktash yang menolak rancangan damai yang dilakukan PBB mengenai Siprus. Erdogan

menghimbau Denktash agar bersungguh-sungguh mengadakan perundingan damai dengan pihak Siprus Yunani. Masalah Siprus bukanlah urusan pribadi Denktash dan kebijakan yang telah menyebabkan Siprus terpecah menjadi separuh Turki separuh Yunani selama 3 dasawarsa tidak bisa dilanjutkan.¹⁰

Atas kecaman Erdogan tersebut membuka mata Denktash untuk mengoreksi politik blokadenya dan mendukung upaya penyatuan Siprus dengan tujuan memperoleh hak-hak bagi Siprus Turki.

F. Hipotesa

Dari latar belakang masalah dan kerangka dasar teori diatas maka hipotesa yang dikemukakan sebagai jawaban sementara adalah :

Dukungan Turki terhadap penyatuan Siprus Turki dan Siprus Yunani disebabkan adanya faktor eksternal yang dominan dan mempengaruhi kebijakan Turki untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

G. Metode Penelitian

Penulisan ini dilakukan dengan metode deduktif, artinya dengan berdasarkan kerangka teori, kemudian ditarik sebuah hipotesa yang akan dibuktikan dengan data-data empiris.

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan atau library research. Oleh karena itu data yang akan diperoleh adalah data sekunder yang bersumber dari literatur-literatur, makalah ilmiah, jurnal, majalah, surat kabar, internet, dan sumber-sumber lain.

¹⁰ Dalam <http://www.pelita.or.id/cetakartikel.php?id=5994>, diakses 10 Oktober 2005

H. Jangkauan Penelitian

Untuk memudahkan penelitian dan upaya data yang kumpulkan tetap relevan dengan permasalahan maka diperlukan batasan waktu pembahasan yaitu dibatasi mulai tahun 2002-2005 tepatnya mulai bulan November 2002, dimana pada waktu itu Tayyip Erdogan berhasil menang dalam pemilu dan terpilih sebagai perdana Menteri Turki. Kemudian setelah kemenangannya tersebut PM Erdogan mulai membuka jalan untuk upaya baru sebagai proses perundingan bagi penyatuan Siprus yang dicetuskan oleh Sekjen PBB Koffe Annan. Namun tidak menutup kemungkinan penulis akan membahas mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah Turki dalam menghadapi konflik Siprus, baik yang terjadi sebelum dan sesudah dimulainya proses perundingan penyatuan Siprus yang dipelopori oleh PBB.

I. Gambaran Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab dan sub bab sebagai berikut:

BAB. I Berisi tentang pendahuluan yang memuat Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penelitian, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Teoritik, Hipotesa, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB. II Memuat pembahasan mengenai kondisi umum Turki, kondisi umum Siprus, keterlibatan Turki di Siprus, serta upaya

perundingan Siprus..

BAB. III Bab ini membahas tentang kebijakan Turki era Erdogan mendukung upaya perdamaian dan unifikasi Siprus yang menyangkut pengaruh faktor internal serta untung rugi bagi Erdogan mendukung upaya perdamaian dan unifikasi Siprus.

BAB. IV Membahas tentang tekanan faktor eksternal yang dominan terhadap kebijakan Turki mendukung upaya penyatuan Siprus, faktor eksternal yang dominan tersebut adalah adanya tekanan dari Uni Eropa, tekanan dari PBB dan internasional, serta masuknya Siprus dalam Uni Eropa.

BAB. V Penutup berisikan kesimpulan yang merangkum isi seluruh yang ada.